

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan kedua, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2011, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, PT. Alumni, Bandung.
- B.Miles, Matthew, A. Mitchael Huberman, 2014, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, cetakan keduabelas, Djambatan, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny 2010, *Teori &Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kaelan, 2008, *Pendidikan Pancasila*, edisi kesembilan, Paradigma Offset, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, edisi revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.

Muhammad, Bushar, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, cetakan kedua belas, PT. Balai Pustaka (persero), Jakarta.

Satrio, J, 2001, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya, Bandung

\_\_\_\_\_, 1999, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, PT Alumni, Bandung.

Setiawan, R, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Percetakan Ekonomi, Bandung

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Sugiharto, Umar said, Suratman, Noorhudha Muchsin, 2015, *Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Setara Press, Malang.

Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filasafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, Nurhasan Ismail, Isharyanto, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi sosial Dan Budaya*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2014, *Semangat Konstitusi dan Alokasi Yang Adil Atas Sumber Daya Alam*, Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang*, GadjahMada University Press, Yogyakarta.

Supriyadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan hukum Perkebunan Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Syah, Mudakir Iskandar, 2014, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

## **B. Artikel, Makalah, Tesis, Skripsi**

Franciska, Lidya, 2013, *Skripsi*, “Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Yang Berada Dalam Hal Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

M. Hadjon, Philipus, 1994, “Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (normatif)”, *Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Unair*, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember, Surabaya.

Sumardjono, Maria SW., “Evaluasi Program MIFEE”, *artikel*, Kompas, 27 September 2013.

\_\_\_\_\_, “Ihwal Hak Komunal atas Tanah”, *artikel*, Kompas.com, edisi 6 Juli 2015.

\_\_\_\_\_, Maria SW Sumardjono, “Sekali Lagi Tentang Hak Komunal”, *artikel*, Kompas.com, edisi 19 Juli 2016.

Sumiarni, Endang, 2013, *Hand Out*, “Metodologi Penelitian Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Suharto, Junio, 2012, “Kepemimpinan Kepala Adat Suku Dayak Taboyan Dalam Pengambilan Keputusan dan Hubungan Kewenangan dengan Pemerintahan Formal di Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara”, *Tesis*, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Tjandra, Riawan, 2014, *hand out Keputusan Tata Usaha Negara* “Bahan Kuliah Hukum Administrasi Negara”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah. Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24.

Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011  
Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.  
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011  
Nomor- dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan  
Tengah Nomor-

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan  
Sengketa Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian  
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan nasional  
Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan  
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor  
98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha  
Perkebunan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009  
sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan  
Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tanah Adat dan Hak-  
Hak Adat di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang  
Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Rechtsglement Buitengewesten (Rbg).*

Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 169 Tahun 1989  
Tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara Merdeka  
(Convention Number 169 Concerning Indigenous and Tribal  
Peoples in Independent Countries)

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi: *United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). Diadopsi oleh *General Assembly Resolution* (Resolusi Sidang Umum PBB) 61/295 pada tanggal 13 September 2007.

#### D. Internet

Sumardjono, Maria S.W., “Evaluasi Program MIFEE”, *artikel*,  
[http://opinikompas.blogspot.co.id/2013/09/evaluasi\\_program\\_miffee.html](http://opinikompas.blogspot.co.id/2013/09/evaluasi_program_miffee.html), 27 september 2013.

Pedoman Konvesi International Labour Organization Nomor 169 Tahun 1989, [www.ilo.org/wcmsp5/goups/public/2asia/ro\\_bangkok/@ilo-jakarta/](http://www.ilo.org/wcmsp5/goups/public/2asia/ro_bangkok/@ilo-jakarta/), Kantor perburuhan Internasional, Jakarta, 2 juni 2015.

Hukumonline, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”, [http://www.hukumonline.com/pus\\_tdata/detail/lt54606\\_7e66f86/node\\_lt52e6279cca/uu-no-39\\_tahun-2014-perkebunan](http://www.hukumonline.com/pus_tdata/detail/lt54606_7e66f86/node_lt52e6279cca/uu-no-39_tahun-2014-perkebunan), 11 September 2015.

Wordpress, “Clipping Today Daily Update Clipping of Forests and Economic Development Articles (Mongabay)Nestapa Warga Kalteng Karena Sawit, Dari Sungai Tercemar sampai Pencaplokan Lahan”,  
<https://cgclipping.wordpress.com/2013/10/01/nestapa-warga-kalteng-karena-sawit-dari-sungai-tercemar-sampai-pencaplokan-lahan/>, 30 September 2013.

Indra Nugraha, “Protes Kebun Sawit dengan Ritual Adat Lima Bulan Penjara buat Hison”,  
<http://www.mongabay.co.id/tag/konflik-warga-dan-sawit-kalteng/>, 26 Mei 2015.

JPNN, “Kapolda Kalteng Bikin Tokoh Adat Tersinggung”,  
<http://www.jpnn.com/read/2013/07/27/183865/index.php>, diakses tanggal 27 Juli 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “sengketa”  
<http://kbbi.web.id/sengketa>, 13 September 2015.

Prokum, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”,  
<http://prokum.esdm.go.id/uu/1999>, 13 September 2015.



Biro Hukum, “Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah”, <http://jdih.kalteng.go.id/uploads/prokum/2012052516195045.pdf.PDF>, 04 Mei 2011.

Biro Hukum, “Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan”,  
[http://kalteng.go.id/userfiles/file/BIRO/HUKUM/Perda/Perda\\_201/Perda\\_5\\_2011.pdf](http://kalteng.go.id/userfiles/file/BIRO/HUKUM/Perda/Perda_201/Perda_5_2011.pdf), 12 September 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “pranata”,  
<http://kbbi.web.id/pranata> , 19 September 2015.

Komisi Yudisial, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”,  
[http://www.komisiyudisial.go.id/download.php?file=uu-No-48/kekuasaan\\_kehakiman-pdf](http://www.komisiyudisial.go.id/download.php?file=uu-No-48/kekuasaan_kehakiman-pdf), 20 September 2015.

Komisi Yudisial, “Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum”,  
[http://www.komisiyudisial.go.id/download.php?file=uu-no-49-2009/perubahan\\_kedua-atas-uu-no-2-tahun-1986-tentang-peradilan-umum.pdf](http://www.komisiyudisial.go.id/download.php?file=uu-no-49-2009/perubahan_kedua-atas-uu-no-2-tahun-1986-tentang-peradilan-umum.pdf), 20 September 2015.

Hukumonline, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum”,  
[http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2593/node/uu-no-2-tahun-1986\\_peradilan-umum](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2593/node/uu-no-2-tahun-1986_peradilan-umum) , 20 september 2015.

Hukumonline, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum”,  
[http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546455c9b16cb/ode/2/u-no-8-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-2-tahun-1986\\_tentangperadilan-umum](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546455c9b16cb/ode/2/u-no-8-tahun-2004-perubahan-atas-undang-undang-nomor-2-tahun-1986_tentangperadilan-umum), 20 September 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “imbalan”,  
<http://kbbi.web.id/imbal-2> , 17 Maret 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “rekognisi”,  
<http://kbbi.web.id/rekognisi>, 23 Maret 2016.



The United Nations, “UNDRIP”,  
[http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS\\_en.pdf](http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf), 16  
April 2016.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Tengah, <http://aman.kalteng.blogspot.co.id/2012/12/undrip-di-wilayah-hukum-indonesia.html>, 16 April 2016

Sumardjono, Maria SW, “Ihwal Hak Komunal Atas Tanah”,  
<http://properti.kompas.com/read/2015/07/06/150450221/Ihwal.Ha.Komunal.atas.Tanah>, 1 Desember 2016.

Sumardjono, Maria SW, “Sekali Lagi Tentang Hak Komunal”, *artikel*,  
Kompas.com, [http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2016/07/9/Sekali-Lagi\\_tentang-Hak-Komunal](http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2016/07/9/Sekali-Lagi_tentang-Hak-Komunal), 19 Juli 2016.